



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 38 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
MULAI TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk meringankan beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPP Pratama Maros dan telah melampaui 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kedaluwarsa mulai Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2011.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran-

- Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Maros Nomor 68 tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 68).

Ab

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA MULAI TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan memimpin Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Kedaluwarsa Penagihan PBB adalah hapusnya/gugurnya hak negara/daerah untuk melakukan penagihan PBB yang terhutang karena lampaunya waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya PBB.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual


Me

- beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan obyek Pajak Bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undang perpajakan daerah.
 13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta transaksi administrasi.
 15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
 17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung mundur sejak Tahun 2011 dan seterusnya saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- 

Pasal 3

- (1) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III

PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 4

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan yang tercantum dalam :

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. STPD
- d. Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan / atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak telah dilakukan secara aktif dengan memberitahukan/menyampaikan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak telah kedaluwarsa; dan
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian dan verifikasi.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Badan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan Pengurus Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pemilik Modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembebasan / likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

- c. Penagihan pajak telah dilakukan secara aktif dengan memberitahukan/menyampaikan kepada Wajib Pajak Badan baik secara langsung maupun dengan menyampaikan melalui pengumuman atau melalui media massa;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak telah kedaluwarsa; dan
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian dan verifikasi.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat tagih lagi atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan Keuangan Daerah dan hasilnya disampaikan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 7

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah diteliti dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB V
FASILITAS

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan fasilitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi,

bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Jumlah lembaran dan besaran nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dihapus karena sudah kedaluwarsa mulai Tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 sejumlah 193.975 lembar dengan nilai Rp. 6.445.785.027,- (Enam milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	
<i>mm</i>	Asisten Setda : <i>L</i>
	Kepala Badan : <i>h</i>
	Sekretaris / Kabid : <i>Sp</i>
TANGGAL	Kasubag / Kasubid : <i>h</i>

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI MAROS, *mm*

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 36

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

I PERATURAN BUPATI MAROS

: 36 TAHUN 2017

: 20 JUNI 2017

: PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
MULAI TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011

NO	NOP	TAHUN	NAMA	NILAI
1	73.08.042.001.005-0023.0	1996	SAPPE HAMU	32,963
2	73.08.042.001.005-0108.0	1996	H.MUHAMMAD TADJUDDIN	7,840
3	73.08.042.007.003-0053.0	1996	ANDI ASSE	64,424
4	73.08.040.024.006-0137.0	1997	HAJI MUDA	10,850
5	73.08.012.006.000-0526.7	1997	ABD. AZIS HALIM	17,000
6	73.08.042.001.005-0023.0	1997	SAPPE HAMU	32,963
7	73.08.042.001.005-0108.0	1997	H.MUHAMMAD TADJUDDIN	7,840
8	73.08.042.001.009-0349.0	1997	TOLA B TJADEDE	1,050
9	73.08.042.001.009-0350.0	1997	TOLA B TJADEDE	2,800
10	73.08.042.006.006-0166.0	1997	NURWANA	2,000
11	73.08.042.007.003-0053.0	1997	ANDI ASSE	57,284
12	73.08.022.003.000-1066.7	1998	MUHTAR	4,550
13	73.08.022.003.000-1067.7	1998	MUHTAR	8,750
14	73.08.022.003.000-1068.7	1998	NADENG	18,375
15	73.08.022.003.000-1069.7	1998	NADENG	12,250
16	73.08.022.003.000-1070.7	1998	HAMIDE	8,750
17	73.08.022.003.000-1071.7	1998	HASBULLAH	1,029
18	73.08.022.003.000-1072.7	1998	NURHAYATI	1,029
19	73.08.022.003.000-1073.7	1998	NASIR. C	4,200
20	73.08.022.003.000-1085.7	1998	IR.BADARUDDIN	12,000
21	73.08.022.003.000-1086.7	1998	GASSING	12,250
22	73.08.022.003.000-1087.7	1998	YUSUFB EMBA	12,000
23	73.08.022.003.000-1088.7	1998	HALIATI	6,000
24	73.08.022.003.000-1089.7	1998	D A D O	2,400
25	73.08.022.003.000-1090.7	1998	RABANI	12,000
26	73.08.022.003.000-1091.7	1998	SULEMAN	6,000
27	73.08.022.003.000-1092.7	1998	SULEMAN	6,000
28	73.08.022.003.000-1093.7	1998	SANUDDIN B DABANG	4,900
29	73.08.022.003.000-1094.7	1998	DG.BUA	12,250
30	73.08.022.003.000-1095.7	1998	BASIR	6,000
31	73.08.022.003.000-1096.7	1998	LALLO.P	1,800
32	73.08.022.003.000-1097.7	1998	CAMBANG BABI	4,900
33	73.08.022.003.000-1098.7	1998	NURDIN CEMPO	2,400
34	73.08.022.003.000-1099.7	1998	M A R O	18,000
35	73.08.022.003.000-1100.7	1998	BARLIAN	980
36	73.08.022.003.000-1101.7	1998	SANTI	4,900
37	73.08.022.003.000-1102.7	1998	HUSENG	12,000
38	73.08.022.003.000-1103.7	1998	SIRAJUDDIN	4,900
39	73.08.022.003.000-1104.7	1998	SIRAJUDDIN	6,125
40	73.08.022.003.000-1105.7	1998	MAN SURSAQ	12,250
41	73.08.022.003.000-1106.7	1998	IR BADARUDDIN	700
42	73.08.022.003.000-1107.7	1998	MUHTAR	700
43	73.08.022.003.000-1108.7	1998	MUHTAR	525
44	73.08.022.003.000-1109.7	1998	TALA	1,400
45	73.08.022.003.000-1110.7	1998	SANTI	1,750
46	73.08.022.003.000-1111.7	1998	BASIR	9,000
47	73.08.022.004.000-3147.7	1998	PADDENGGENG	3,566
48	73.08.022.004.000-3148.7	1998	SUMARNI	2,674
49	73.08.022.004.000-3149.7	1998	BACO RABA	2,975
50	73.08.022.005.000-0895.7	1998	MAKMUR BIN SAGGA	7,000
51	73.08.022.005.000-0896.7	1998	SALMA SYAMSUDDIN	1,615
52	73.08.022.005.000-0897.7	1998	MAHMUD DG. TUNRU	1,260
53	73.08.022.005.000-0898.7	1998	H. ABD. HALID S. AG	3,000
54	73.08.022.006.000-0717.7	1998	HAJI RAPIAH	784
55	73.08.022.006.000-0718.7	1998	SITTI JUSMA WATI	1,200
56	73.08.022.006.000-0719.7	1998	SANATI	1,286
57	73.08.022.006.000-0720.7	1998	PUANG KEBO	700

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 36 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 JUNI 2017
 TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
 MULAI TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011

NO	NOP	TAHUN	NAMA	NILAI
1	73.08.020.007.008.0029.0	2009	DG. MAKKELO	5,002
2	73.08.040.007.003.0056.0	2009	HADERAH B. SADO	5,004
3	73.08.040.007.011.0139.0	2009	HAMMADO	5,004
4	73.08.040.007.011.0169.0	2009	RIPE MANTANG	5,004
5	73.08.030.007.003.0081.0	2009	IWAN B. MASSE	5,005
6	73.08.030.007.003.0112.0	2009	ATIJI B. SATA	5,005
7	73.08.030.007.004.0069.0	2009	IWAN B. MASSE	5,005
8	73.08.030.007.004.0171.0	2009	MARIA MA	5,005
9	73.08.030.008.004.0047.0	2009	RAODA	5,005
10	73.08.030.014.003.0048.0	2009	USMAN H.BUHASANG	5,005
11	73.08.030.014.003.0049.0	2009	PT.BOSOWA	5,005
12	73.08.041.009.004.0255.0	2009	H MANGA SATTING	5,005
13	73.08.020.007.005.0232.0	2009	ANSAR B PABO	5,005
14	73.08.020.007.007.0038.0	2009	AMIN	5,005
15	73.08.020.008.000.0019.7	2009	BADUNG B.TJAKO	5,005
16	73.08.020.008.000.0037.7	2009	BATJO KALANRAI B.LALANG	5,005
17	73.08.020.008.000.0044.7	2009	BATJO MASAKING B.TJEMA	5,005
18	73.08.020.008.000.0067.7	2009	DJUMA B.DJUMADE	5,005
19	73.08.020.008.000.0081.7	2009	DARISE B.LAHABBE	5,005
20	73.08.020.008.000.0095.7	2009	DJAINA B.JATTA	5,005
21	73.08.020.008.000.0124.7	2009	KARASUNG B.MALLONG	5,005
22	73.08.020.008.000.0134.7	2009	KULA	5,005
23	73.08.020.008.000.0137.7	2009	KODANG B.BATJO TANRE	5,005
24	73.08.020.008.000.0139.7	2009	KAMMISI B.BURRU	5,005
25	73.08.020.008.000.0140.7	2009	KAU B.BADJDDJI	5,005
26	73.08.020.008.000.0146.7	2009	KAMPUE B.DJAMALU	5,005
27	73.08.020.008.000.0149.7	2009	LUKA	5,005
28	73.08.020.008.000.0151.7	2009	LATJULE B.SELASA	5,005
29	73.08.020.008.000.0173.7	2009	MARENG B.DONGGA	5,005
30	73.08.020.008.000.0192.7	2009	MENDA B.LATTU	5,005
31	73.08.020.008.000.0263.7	2009	PALO B.POHE	5,005
32	73.08.020.008.000.0416.7	2009	ST.AMINAH B.SAENONG	5,005
33	73.08.020.008.000.0432.7	2009	PARAKKASI B.BATJO NONGKO	5,005
34	73.08.020.008.000.0447.7	2009	BECCE B.SAGINI	5,005
35	73.08.020.008.000.0453.7	2009	HADJI BHAMA	5,005
36	73.08.020.008.000.0462.7	2009	SEMMANG B.TJOLE	5,005
37	73.08.020.008.000.0466.7	2009	BALI B.TJAKELE	5,005
38	73.08.020.008.000.0469.7	2009	TADJUDDING B.MAPPALEPPANG	5,005
39	73.08.020.008.000.0477.7	2009	BONDENG B.DJAYA	5,005
40	73.08.020.008.000.0491.7	2009	MARI B.JAKA	5,005
41	73.08.020.008.000.0497.7	2009	RAHMATIA B.BATJO	5,005
42	73.08.020.008.000.0521.7	2009	MAUB.TJOA	5,005
43	73.08.020.008.000.0541.7	2009	TJAMPUNG B.HASAN	5,005
44	73.08.020.008.000.0690.7	2009	SAKE BPADDA	5,005
45	73.08.020.008.000.0797.7	2009	MASSETUWOB	5,005
46	73.08.020.008.000.0801.7	2009	AMBOUPEB	5,005
47	73.08.020.008.000.0802.7	2009	MANGGUB	5,005
48	73.08.020.008.000.0805.7	2009	AMBONAI B	5,005
49	73.08.020.008.000.0809.7	2009	RABANAB	5,005
50	73.08.020.008.000.0813.7	2009	TAHONG	5,005
51	73.08.020.008.000.0814.7	2009	GALLANG	5,005
52	73.08.020.008.000.0816.7	2009	ASAPE	5,005
53	73.08.020.008.000.0823.7	2009	M A D E	5,005
54	73.08.021.004.000.0150.7	2009	SATTUNG	5,005
55	73.08.021.004.000.0429.7	2009	JAKI	5,005
56	73.08.021.004.000.0436.7	2009	DUDIANG	5,005
57	73.08.021.004.000.0439.7	2009	CICI	5,005

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 36 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 JUNI 2017
 TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
 MULAI TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011

NO	NOP	TAHUN	NAMA	NILAI
1	73.08.020.007.008.0029.0	2010	DG. MAKKELO	5,002
2	73.08.030.005.004.0040.0	2010	H LABBASE	5,005
3	73.08.030.008.004.0047.0	2010	RAODA	5,005
4	73.08.030.014.003.0048.0	2010	USMAN H.BUHASANG	5,005
5	73.08.030.014.003.0049.0	2010	PT.BOSOWA	5,005
6	73.08.030.014.020.0022.0	2010	SAGUNI BATANG	5,005
7	73.08.041.009.004.0255.0	2010	H MANGA SATTING	5,005
8	73.08.020.007.005.0232.0	2010	ANSAR B PABO	5,005
9	73.08.020.007.007.0038.0	2010	AMIN	5,005
10	73.08.020.008.000.0350.7	2010	TJALE B.TJIMMO	5,005
11	73.08.020.008.000.0368.7	2010	UDDING B.MOHA B.PANDJE	5,005
12	73.08.020.008.000.0416.7	2010	ST.AMINAH B.SAENONG	5,005
13	73.08.020.008.000.0432.7	2010	PARAKKASI B.BATJO NONGKO	5,005
14	73.08.020.008.000.0447.7	2010	BECCE B.SAGINI	5,005
15	73.08.020.008.000.0453.7	2010	HADJI B HAMA	5,005
16	73.08.020.008.000.0462.7	2010	SEMMANG B.TJOLE	5,005
17	73.08.020.008.000.0466.7	2010	BALI B.TJAKELE	5,005
18	73.08.020.008.000.0469.7	2010	TADJUDDING B.MAPPALEPPANG	5,005
19	73.08.020.008.000.0477.7	2010	BONDENG B.DJAYA	5,005
20	73.08.020.008.000.0491.7	2010	MARI B.JAKA	5,005
21	73.08.020.008.000.0497.7	2010	RAHMATIA B.BATJO	5,005
22	73.08.020.008.000.0521.7	2010	MAU B.TJOA	5,005
23	73.08.020.008.000.0541.7	2010	TJAMPUNG B.HASAN	5,005
24	73.08.020.008.000.0690.7	2010	SAKE B PADDA	5,005
25	73.08.020.008.000.0797.7	2010	MASSETUWO B	5,005
26	73.08.020.008.000.0801.7	2010	AMBO UPEB	5,005
27	73.08.020.008.000.0802.7	2010	MANGNGUB	5,005
28	73.08.020.008.000.0805.7	2010	AMBO NAI B	5,005
29	73.08.020.008.000.0809.7	2010	RABANAB	5,005
30	73.08.020.008.000.0813.7	2010	TAHONG	5,005
31	73.08.020.008.000.0814.7	2010	GALLANG	5,005
32	73.08.020.008.000.0816.7	2010	ASAPE	5,005
33	73.08.020.008.000.0823.7	2010	M A D E	5,005
34	73.08.020.020.000.0057.7	2010	KALLOTONG PR B PALILI	5,005
35	73.08.020.020.000.0237.7	2010	TJINTA B LAMBE	5,005
36	73.08.020.020.000.0397.7	2010	BONDENG	5,005
37	73.08.020.020.000.0416.7	2010	MASNATI	5,005
38	73.08.020.020.000.0417.7	2010	MURNI	5,005
39	73.08.020.020.000.0543.7	2010	KASENG	5,005
40	73.08.020.020.000.0544.7	2010	KASENG	5,005
41	73.08.020.020.000.0549.7	2010	NABA	5,005
42	73.08.020.020.000.0550.7	2010	MURA	5,005
43	73.08.020.020.000.0569.7	2010	SIBE	5,005
44	73.08.020.020.000.0609.7	2010	GEDDONG	5,005
45	73.08.020.020.000.0643.7	2010	AGUSTINUS	5,005
46	73.08.020.020.000.0663.7	2010	BACOR	5,005
47	73.08.022.003.000.1173.7	2010	SIOJANG	5,005
48	73.08.021.004.000.0150.7	2010	SATTUNG	5,005
49	73.08.021.004.000.0429.7	2010	JAKI	5,005
50	73.08.021.004.000.0436.7	2010	DUDIANG	5,005
51	73.08.021.004.000.0439.7	2010	CICI	5,005
52	73.08.021.004.000.0442.7	2010	KALLO	5,005
53	73.08.021.004.000.0446.7	2010	PAMMA	5,005
54	73.08.021.004.000.0457.7	2010	LUMBA	5,005
55	73.08.021.004.000.0459.7	2010	LANCO G	5,005
56	73.08.021.004.000.0543.7	2010	PINIGE B BATY SALLE	5,005
57	73.08.021.004.000.0606.7	2010	KANNO B MANGGI	5,005

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 38 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 JUNI 2017
 TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
 MULAI TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011

NO	NOP	TAHUN	NAMA	NILAI
1	73.08.030.008.004.0047.0	2011	RAODA	5,005
2	73.08.030.014.003.0048.0	2011	USMAN H.BUHASANG	5,005
3	73.08.030.014.003.0049.0	2011	PT. SEMEN BOSOWA MAROS	5,005
4	73.08.030.014.020.0022.0	2011	SAGUNI BATANG	5,005
5	73.08.041.009.004.0255.0	2011	H MANGA SATTING	5,005
6	73.08.020.008.000.0019.7	2011	BADUNG B.TJAKO	5,005
7	73.08.020.008.000.0263.7	2011	PALO B.POHE	5,005
8	73.08.020.008.000.0278.7	2011	RANNI B.SUARA	5,005
9	73.08.020.008.000.0343.7	2011	TJALE	5,005
10	73.08.020.008.000.0348.7	2011	TJALE B.TJIMMO	5,005
11	73.08.020.008.000.0350.7	2011	TJALE B.TJIMMO	5,005
12	73.08.020.008.000.0368.7	2011	UDDING B.MOHA B.PANDJE	5,005
13	73.08.020.008.000.0416.7	2011	ST.AMINAH B.SAENONG	5,005
14	73.08.020.008.000.0432.7	2011	PARAKKASI B.BATJO NONGKO	5,005
15	73.08.020.008.000.0447.7	2011	BECCE B.SAGINI	5,005
16	73.08.020.008.000.0453.7	2011	HADJIB HAMA	5,005
17	73.08.020.008.000.0462.7	2011	SEMMANG B.TJOLE	5,005
18	73.08.020.008.000.0466.7	2011	BALI B.TJAKELE	5,005
19	73.08.020.008.000.0469.7	2011	TADJUDDING B.MAPPALEPPANG	5,005
20	73.08.020.008.000.0477.7	2011	BONDENG B.DJAYA	5,005
21	73.08.020.008.000.0491.7	2011	MARI B.JAKA	5,005
22	73.08.020.008.000.0497.7	2011	RAHMATIA B.BATJO	5,005
23	73.08.020.008.000.0521.7	2011	MAUB.TJOA	5,005
24	73.08.020.008.000.0541.7	2011	TJAMPUNG B.HASAN	5,005
25	73.08.022.003.000.1173.7	2011	SIOJANG	5,005
26	73.08.021.004.000.0150.7	2011	SATTUNG	5,005
27	73.08.021.004.000.0429.7	2011	JAKI	5,005
28	73.08.021.004.000.0436.7	2011	DUDIANG	5,005
29	73.08.021.004.000.0439.7	2011	CICI	5,005
30	73.08.021.004.000.0442.7	2011	KALLO	5,005
31	73.08.021.004.000.0446.7	2011	PAMMA	5,005
32	73.08.021.004.000.0457.7	2011	LUMBA	5,005
33	73.08.021.004.000.0459.7	2011	LANCO G	5,005
34	73.08.021.004.000.0543.7	2011	PINIGE B BATY SALLE	5,005
35	73.08.021.004.000.0606.7	2011	KANNO B MANGGI	5,005
36	73.08.021.004.000.0628.7	2011	AMBO ENRE B MAMPA	5,005
37	73.08.021.004.000.0667.7	2011	AMBOASSE	5,005
38	73.08.021.004.000.0671.7	2011	BEDDU B TJANGGO	5,005
39	73.08.021.004.000.0719.7	2011	GALEBE B SEMMA	5,005
40	73.08.010.012.007.0014.0	2011	RUMPA	5,005
41	73.08.010.012.007.0142.0	2011	NONGKO NAWAING	5,005
42	73.08.010.012.027.0026.0	2011	SUPU MASARA	5,005
43	73.08.040.007.009.0196.0	2011	H. LAWI SOLO	5,005
44	73.08.040.007.009.0199.0	2011	AHMADUMAR	5,005
45	73.08.040.007.009.0237.0	2011	HAJI UMAR B TANAKKALA	5,005
46	73.08.040.024.001.0356.0	2011	RIDOB NOMPO	5,005
47	73.08.040.024.001.0402.0	2011	H. LENTENG B SANGKALA	5,005
48	73.08.040.024.001.0403.0	2011	MANTANG B SANGKALA	5,005
49	73.08.040.024.001.0404.0	2011	BONDENG B SANGKALA	5,005
50	73.08.040.024.005.0196.0	2011	PATAHUDDIN BIN TALO	5,005
51	73.08.040.025.002.0072.0	2011	BASO HASANI	5,005
52	73.08.040.025.002.0074.0	2011	NURSIA B. SAID	5,005
53	73.08.040.025.002.0171.0	2011	H. M. AMIN	5,005
54	73.08.040.025.002.0287.0	2011	YESSE	5,005
55	73.08.013.003.006.0173.0	2011	JAMA	5,005
56	73.08.013.005.012.0095.0	2011	MARDIA BINTI HASENG	5,005
57	73.08.011.012.001.0050.0	2011	ABD HAMID , SPD	5,005

97718	73.08.044.005.015-0029.0	2008	HJ. SYAMSIAH	649,790
97719	73.08.044.005.015-0035.0	2008	NY. USMAN	644,320
97720	73.08.044.005.015-0036.0	2008	NY. USMAN	862,200
97721	73.08.044.005.015-0043.0	2008	IR.NASRULLAH	700,000
97722	73.08.021.011.000-0711.7	2008	HAJI ANDI PEWADJOI	918,540
97723	73.08.010.002.002-0005.0	2008	PT. ANGKASA PURA I	2,877,360
97724	73.08.010.002.002-0021.0	2008	HAJI LALLA	594,015
97725	73.08.040.005.001-0005.0	2008	H. MUH. AMIN MASSAERE	790,000
97726	73.08.043.001.001-0012.0	2008	H. AMIR HS	522,480
97727	73.08.043.001.001-0046.0	2008	H. MUSA RAHIM	816,480
97728	73.08.043.002.003-0110.0	2008	ONG BUN SIONG	2,587,666
97729	73.08.043.003.001-0013.0	2008	H. ABD KARIM	541,165
97730	73.08.043.003.001-0026.0	2008	SUHARTONO	677,850
97731	73.08.043.003.001-0180.0	2008	H. M. SUNUSI	600,300
97732	73.08.043.003.002-0001.0	2008	H. ABD. LATIF	506,895
97733	73.08.043.003.003-0029.0	2008	H. HABUBA B NASIRE	712,195
97734	73.08.043.003.003-0030.0	2008	RAMELLAH B NASIRE	994,410
97735	73.08.043.003.003-0034.0	2008	JEMMY. HW	670,000
97736	73.08.043.003.003-0040.0	2008	SAMAILA B NASIR	672,761
97737	73.08.043.003.003-0048.0	2008	MUH. ALI	665,095
97738	73.08.043.003.003-0051.0	2008	RATNA SARI DEWI	4,486,000
97739	73.08.043.003.004-0001.0	2008	H.HABUBA	591,800
97740	73.08.043.003.005-0039.0	2008	IR.KURNIATY A.S/PT.PRO EXCEL	599,930
97741	73.08.043.003.005-0170.0	2008	H.M. SENIMAN LATIF, SE / BPR	764,655
97742	73.08.043.003.008-0186.0	2008	H. BOSRA DG. PAWERO	860,200
97743	73.08.042.001.002-0215.0	2008	ACHMAD THOHIR	534,375
97744	73.08.042.001.012-0046.0	2008	PT. ISKANDAR REAL ESTATE	742,920
97745	73.08.042.003.005-0515.0	2008	H.A.SAKKA	592,000
97746	73.08.042.003.005-0648.0	2008	BANK BPD SULSEL CAB.MAROS	8,537,970
97747	73.08.042.003.007-0124.0	2008	ACHMAD THOHIR	771,840
97748	73.08.042.003.008-0018.0	2008	PT. SATWA UTAMA RAYA	18,632,910
97749	73.08.042.003.008-0048.0	2008	H. M. YUSUF D	782,976
97750	73.08.042.006.001-0093.0	2008	PT. YANUAR PERKASA	10,354,320
JUMLAH				2,591,925,322

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

M

TANGGAL

PARAF

Asisten Setda : *L*

Kepala Badan : *[Signature]*

Sekretaris / Kabid : *[Signature]*

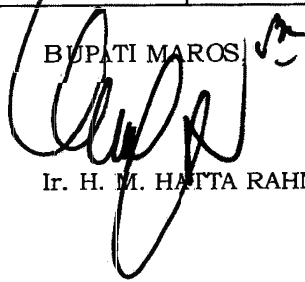
Kasubag / Kasubid : *[Signature]*

BUPATI MAROS *[Signature]*

Ir. H. M. HATTA RAHMAN. MM

27813	73.08.043.003.001.0180.0	2009	H. M. SUNUSI	842,850
27814	73.08.043.007.002.0001.0	2009	H.SAAD	850,000
27815	73.08.044.005.009.0005.0	2009	H. ABD. RAHMAN HS	853,430
27816	73.08.043.003.008.0186.0	2009	H. BOSRA DG. PAWERO	860,200
27817	73.08.044.005.015.0036.0	2009	NY. USMAN	862,200
27818	73.08.043.003.003.0084.0	2009	RATNA SARI DEWI	890,827
27819	73.08.043.004.009.0358.0	2009	H. DOLO	902,490
27820	73.08.021.011.000.0711.7	2009	HAJI ANDI PEWADJOI	918,540
27821	73.08.040.017.006.0146.0	2009	SD 52 BAWALANGIRI	972,350
27822	73.08.043.003.003.0030.0	2009	RAMELLAH B NASIRE	999,510
27823	73.08.043.004.009.0441.0	2009	IR.DAHRIKUDDU,MT	2,094,830
27824	73.08.043.002.002.0197.0	2009	HJ. NURSIDA	2,180,224
27825	73.08.042.003.001.0076.0	2009	H. SANUSI DG. NABA	2,244,042
27826	73.08.043.003.005.0170.0	2009	H.M. SENIMAN LATIF, SE / BPR	2,326,700
27827	73.08.041.006.008.0051.0	2009	H. BUHARI	2,434,880
27828	73.08.043.003.001.0014.0	2009	BASO BASRI	2,447,740
27829	73.08.043.002.003.0110.0	2009	ONG BUN SIONG	2,587,666
27830	73.08.043.007.015.0087.0	2009	ABU BAEDAH	2,656,640
27831	73.08.043.007.015.0050.0	2009	ABU BAEDAH	2,712,192
27832	73.08.043.007.015.0051.0	2009	ABU BAEDAH	2,712,360
27833	73.08.013.003.010.0415.0	2009	H HAMKA M	2,792,610
27834	73.08.043.006.003.0140.0	2009	TIA	2,796,360
27835	73.08.043.006.003.0139.0	2009	MUALIDO	2,828,323
27836	73.08.030.007.007.0064.0	2009	SYAMSIAH B H.RAPPE	2,865,604
27837	73.08.010.002.002.0005.0	2009	PT. ANGKASA PURA I	2,877,360
27838	73.08.041.009.004.0164.0	2009	H MUSTAPA TARO	2,920,000
27839	73.08.040.017.005.0001.0	2009	BALAI PENELITIAN PERIKANAN	3,065,076
27840	73.08.042.003.007.0127.0	2009	ABBAS HARUNA	3,235,430
27841	73.08.042.001.006.0109.0	2009	HJ. SUHARTINA ROSIDIN	4,371,330
27842	73.08.043.003.003.0051.0	2009	RATNA SARI DEWI	4,486,000
27843	73.08.042.003.007.0126.0	2009	NY. H. MARYAM HARUNA	4,516,380
27844	73.08.042.002.004.0008.0	2009	H. HUSAENI	4,653,684
27845	73.08.022.006.000.0672.7	2009	MUH. ADIL NUR	4,658,250
27846	73.08.043.002.001.0031.0	2009	HARRY YOURIS	7,661,924
27847	73.08.042.003.005.0648.0	2009	BANK BPD SULSEL CAB.MAROS	8,537,970
27848	73.08.042.006.001.0093.0	2009	PT. YANUAR PERKASA	10,354,320
JUMLAH				929,274,155

BUPATI MAROS



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

PARAF

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	Asisten Setda : _____
TANGGAL	Kepala Badan : _____
	Sekretaris/Kabid : _____
	Kasubag / Kasubid : _____

40488	73.08.040.017.005.0001.0	2010	BALAI PENELITIAN PERIKANAN	3,065,076
40489	73.08.042.003.007.0127.0	2010	ABBAS HARUNA	3,235,430
40490	73.08.010.010.005.0011.0	2010	HAJJA ANIEK SYAFRUDDIN	3,350,000
40491	73.08.043.003.001.0019.0	2010	PT. BPR TARUNA JUJUR S. KT	3,449,690
40492	73.08.012.001.001.0126.0	2010	NASBIDIN	3,511,540
40493	73.08.042.003.005.0332.0	2010	H. AHMAD CAHO	3,609,600
40494	73.08.042.001.006.0109.0	2010	HJ. SUHARTINA ROSIDIN	4,371,330
40495	73.08.043.003.003.0051.0	2010	RATNA SARI DEWI	4,486,000
40496	73.08.012.002.006.0315.0	2010	HZB PALAGUNA	5,007,717
40497	73.08.030.014.003.0046.0	2010	PT.BOSOWA	5,040,000
40498	73.08.042.002.004.0008.0	2010	H. HUSAIN	6,039,432
40499	73.08.031.006.008.0002.0	2010	ANDI ROKKI	6,720,000
40500	73.08.022.006.000.0672.7	2010	MUH. ADIL NUR	6,750,600
40501	73.08.043.002.001.0031.0	2010	HARRY YOURIS	7,661,924
40502	73.08.012.003.015.0015.0	2010	PK RIFAI	10,010,000
40503	73.08.012.003.015.0016.0	2010	PK RIFAI	10,010,000
40504	73.08.042.006.001.0093.0	2010	PT. YANUAR PERKASA	10,354,320
40505	73.08.044.001.008.0143.0	2010	PT. BANTIMURUNG INDAH	10,435,420
40506	73.08.012.003.003.0008.0	2010	PT MULTI BREDER ADIRAMA	13,711,310
40507	73.08.042.003.007.0126.0	2010	HJ SUHARTINA	16,618,360
40508	73.08.012.002.006.0215.0	2010	KEBUN RAYA PUCAK	18,018,000
40509	73.08.043.004.009.0352.0	2010	H. AGUS	22,216,200
40510	73.08.030.014.012.0001.0	2010	PERUM. PT. SEMEN BOSOWA MA	23,911,520
40511	73.08.012.002.003.0005.0	2010	PT SATWA MUDA KARYA	25,729,411
JUMLAH				1,522,953,348

IBU FIA' TI MAROS, *[Signature]*
 Ir. H. M. HATTA RAHMAN. MM

PARAF

Asisten Setda : _____

Kepala Badan : _____

Sekretaris / Kabid : _____

Kasubag / Kasubid : _____

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

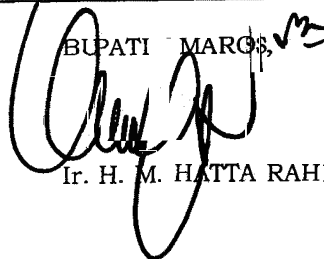
[Signature]

TANGGAL _____

27813	73.08.043.002.002.0197.0	2011	HJ. NURSIDA	2,180,224
27814	73.08.040.005.001.0005.0	2011	H. MUH. AMIN MASSAERE	2,212,000
27815	73.08.020.019.000.1342.7	2011	PT.TELKOMSEL	2,246,438
27816	73.08.012.003.015.0302.0	2011	HJ HAMO	2,288,000
27817	73.08.043.003.002.0164.0	2011	NURBAYA	2,303,024
27818	73.08.043.003.001.0180.0	2011	H. M. SUNUSI	2,383,000
27819	73.08.013.003.014.0474.0	2011	SANGKALA HERY TAEPE	2,393,604
27820	73.08.042.003.006.0118.0	2011	H.ABD.RAHIM SOLONG	2,444,924
27821	73.08.040.017.006.0146.0	2011	SD 52 BAWALANGIRI	2,450,300
27822	73.08.043.003.008.0186.0	2011	H. BOSRA DG. PAWERO	2,451,570
27823	73.08.011.004.015.0007.0	2011	DG LIMPO	2,463,232
27824	73.08.043.003.005.0060.0	2011	H. M. DG. LALA	2,480,916
27825	73.08.042.003.005.0512.0	2011	H. RAUF ERANG	2,600,400
27826	73.08.043.003.009.0113.0	2011	H. HASAN SAENI, SH	2,636,800
27827	73.08.043.004.009.0362.0	2011	CAYA	2,639,800
27828	73.08.043.007.015.0087.0	2011	ABU BAEDAH	2,656,640
27829	73.08.042.003.001.0076.0	2011	H. SANUSI DG. NABA	2,704,544
27830	73.08.043.007.015.0050.0	2011	ABUBAEDAH	2,712,192
27831	73.08.043.007.015.0051.0	2011	ABU BAEDAH	2,712,360
27832	73.08.043.003.003.0048.0	2011	MUH. ALI	2,796,000
27833	73.08.043.003.003.0034.0	2011	JEMMY. HW	2,808,000
27834	73.08.043.003.007.0228.0	2011	MUDA S/CARABA	2,906,400
27835	73.08.041.009.004.0164.0	2011	H MUSTAPA TARO	2,920,000
27836	73.08.043.003.003.0029.0	2011	H. HABUBA B NASIRE	2,989,468
27837	73.08.043.003.002.0003.0	2011	NY. CATHARINA B.	2,991,080
27838	73.08.012.001.007.0026.0	2011	HJHASNAH	3,026,996
27839	73.08.040.017.005.0001.0	2011	BALAI PENELITIAN PERIKANAN	3,065,076
27840	73.08.043.003.001.0014.0	2011	BASO BASRI	3,100,312
27841	73.08.043.003.005.0170.0	2011	H.M. SENIMAN LATIF, SE / BPR	3,156,120
27842	73.08.040.005.001.0029.0	2011	SAMUEL BASRI S MINGGU	3,239,808
27843	73.08.010.002.002.0005.0	2011	PT. ANGKASA PURA I	3,382,160
27844	73.08.012.001.001.0126.0	2011	NASBIDIN	3,511,540
27845	73.08.043.001.006.0061.0	2011	PAIMUN	4,284,152
27846	73.08.030.005.017.0012.0	2011	JUPITER WIDODO	4,542,816
27847	73.08.010.010.005.0011.0	2011	HAJJA ANIEK SYAFRUDDIN	4,640,000
27848	73.08.042.003.008.0048.0	2011	H. M. YUSUF D	4,820,196
27849	73.08.030.014.003.0046.0	2011	PT.BOSOWA	5,040,000
27850	73.08.043.003.001.0019.0	2011	PT. BPR TARUNA JUJUR S. KT	5,448,372
27851	73.08.043.002.001.0031.0	2011	HARRY YOURIS	6,281,060
27852	73.08.042.002.004.0008.0	2011	H. HUSAIN	6,626,368
27853	73.08.031.006.008.0002.0	2011	ANDI ROKKI	6,720,000
27854	73.08.022.006.000.0672.7	2011	MUH. ADIL NUR	6,750,600
27855	73.08.042.001.006.0109.0	2011	HJ. SUHARTINA ROSIDIN	7,116,832
27856	73.08.042.003.007.0127.0	2011	ABBAS HARUNA	7,745,716
27857	73.08.042.006.001.0093.0	2011	PT. YANUAR PERKASA	10,354,320
27858	73.08.043.003.008.0260.0	2011	HJ. LEBU BT. RAHMAN	11,403,740
27859	73.08.042.003.004.0698.0	2011	IR H A RAHMAN HALID, MM	14,816,000
27860	73.08.043.007.002.0093.0	2011	H.ABD.LATIF	15,645,580
27861	73.08.012.002.006.0315.0	2011	CV PUCAK TEACHING FARM	16,634,752
27862	73.08.012.002.006.0215.0	2011	KEBUN RAYA PUCAK	18,018,000
27863	73.08.043.004.009.0352.0	2011	H.AGUS	20,019,940
27864	73.08.030.014.012.0001.0	2011	PERUM. PT. SEMEN BOSOWA MAROS	21,208,720
27865	73.08.012.002.003.0005.0	2011	PT SATWA MUDA KARYA	25,729,411
27866	73.08.042.003.007.0126.0	2011	HJ SUHARTINA	27,217,392
JUMLAH				1,401,632,202

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
<i>He</i>
TANGGAL

P A R A F	
Asisten Setda	:
Kepala Badan	:
Sekretaris/ Kabid	:
Kasubag / Kasiti	:

BUPATI MAROS ^{MM}

 Ir. H. M. HATTA RAHMAN. MM